



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Maya Sartika
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I
3. NHK : 400813

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOBIL, PROTON EXXORA 1.6L MT FL BASE LINE/MINIBUS
Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 289.050.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.812.421.720

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.426.471.720

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.426.471.720

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TARWOTO
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL JAKARTA II
3. NHK : 114910

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	205.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX 2018 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX 2023 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER SUV Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	156.832.785
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.111.832.785
III. HUTANG	Rp.	810.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.301.832.785

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PURWANTO**
2. Jabatan : **PELELANG AHLI MADYA KPKNL SERANG**
3. NHK : **78816**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.690.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.700 m2/1 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 8.130 m2/1 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.489 m2/9 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **399.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G MANUAL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **207.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **49.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.345.500.000

III. HUTANG

Rp. 195.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.150.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.